



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ 660 /KEP/35.07.013/2023  
TENTANG  
MATERI PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/640/KEP/35.07.013/2022 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
- c. bahwa sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Desember 2023 Nomor: B/981/RB.06/2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/640/KEP/35.07.013/2022 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b. dan huruf c serta berpedoman pada Pasal 342 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/172/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- Memperhatikan :
1. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Desember 2023 Nomor: B/981/RB.06/2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
  2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 25 Juli 2023 Nomor: 100.3.3.2/4259/35.07.202/2023 perihal *Draft* Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/640/KEP/35.07.013/2022 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
  3. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 25 Juli 2023 Nomor: 100.3.3.2/4260/35.07.202/2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

**KEDUA** : Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** sebagai berikut:

- a. Tabel yang memuat perubahan terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah;
- b. Tabel Perubahan Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah (semua nilai rentang menjadi nilai mutlak);

- c. Pohon Kinerja Isu 1 (Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul);
- d. Pohon Kinerja Isu 2 (Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik); dan
- e. Pohon Kinerja Isu 3 (Mengembangkan Potensi Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Seimbang, Berkesinambungan dan Kondusif), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA** : Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/640/KEP/35.07.013/2022 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 28 Juli 2023



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
  3. Inspektur;
  4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ 660/KEP/35.07.013/2023  
TENTANG  
MATERI PERUBAHAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2021-2026

a. Tabel yang memuat perubahan terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah

URAIAN	IKU SESUAI RPJMD	IKU SESUAI PERMEN PAN & RB NOMOR 3 TAHUN 2023	ISU PERMASALAHAN
<b>JUMLAH TUJUAN</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	
<b>JUMLAH IKU</b>	<b>12 Indikator</b>	<b>8 Indikator</b>	
	1 Indeks Pembangunan Manusia	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul
	2 Indeks Pembangunan Gender	2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	3 Indeks Reformasi Birokrasi	3 Indeks Reformasi Birokrasi	
	4 Pertumbuhan Ekonomi	4 Pertumbuhan Ekonomi	2 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik
	5 Persentase Desa Mandiri	5 Indeks Desa Membangun	
	6 Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	6 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
	7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
	8 Persentase Tingkat Kemiskinan	8 Presentase Kualitas Infrastruktur	
	9 Pendapatan Perkapita Riil		3 Mengembangkan Potensi Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Seimbang, Berkesinambungan dan Kondusif
	10 Indeks Gini		
	11 Tingkat Pengangguran Terbuka		
	12 Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah		
<b>JUMLAH SASARAN</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	
<b>JUMLAH IKD</b>	<b>43 Indikator</b>	<b>21 Indikator</b>	

b. Tabel Perubahan Target IKU dan IKD (semua nilai rentang menjadi nilai mutlak)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Akhir Periode RPJMD Tahun 2026	Ket
						2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul	Meningkatkan Pembangunan sumber daya manusia yang unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,36	71,13	71,54	72,07	72,59	73,11	73,11	
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,613	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71	
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,45	72,71	72,84	72,97	73,1	73,23	73,23	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	
			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	%	-	-	0,25	0,20	0,20	0,30	0,30	Indikator Baru
2	Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila	Merumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks	-	-	59,87	71,25	82,62	94	94	Indikator Baru
			Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks	-	-	59,87	71,25	82,62	94	94	Indikator Baru

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Akhir Periode RPJMD Tahun 2026	Ket
						2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,62	71,62	72,12	72,62	73,12	73,62	73,62	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	73,24	81,00	82,50	84,00	85,50	87,00	87,00	
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
				Level Maturitas SPIP	Level	-	-	3	3	3	3	3	Indikator Baru
				Indeks Sistem Perintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,85	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,0	
				Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71,05	66	67	68	69	70	70	
				Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,43	85	85,50	86	86,50	87	87
	Meningkatkan kemandirian	Indeks Desa Membangun	Indeks	-	-	0,8037	0,8277	0,8517	0,8757	0,8757	Indikator Baru		



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Akhir Periode RPJMD Tahun 2026	Ket	
						2020	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	%	14,81	16,93	17,99	19,05	20,11	21,16	21,16		
				Presentase Kualitas Infrastruktur	%	-	-	63,26	65,05	66,87	68,87	68,87	Indikator Baru	
				Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Presentase Kualitas Infrastruktur	%	-	-	63,26	65,05	66,87	68,87	68,87	Indikator Baru
4	Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,68	88,745	88,755	88,785	88,805	88,825	88,825		
				Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,68	70,58	70,88	71,18	71,48	71,78	71,78	
				Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,66	0,61	0,58	0,56	0,53	0,50	0,50	
5	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,68	4,2	4,6	5,1	5,3	5,5	5,5		
				Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan	%	-	-	8,25	7,63	7,09	6,62	6,62	Indikator Baru

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Akhir Periode RPJMD Tahun 2026	Ket
						2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan</b>			investasi									
			Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	%	-	-	4,45	4,74	4,82	4,88	4,88	Indikator Baru
			Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	%	15,3	15,31	15,32	15,32	15,33	15,33	15,33	
		Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,33	57,79	58,13	58,47	58,81	59,15	59,15	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,33	57,79	58,13	58,47	58,81	59,15	59,15	
			Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	122,82	99,48	89,53	80,58	72,52	65,27	65,27	



## POHON KINERJA

### Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik

IK : Indeks Reformasi Birokrasi

<p>Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi dan Kapasitas ASN IK: Indeks Profesionalitas ASN</p>	<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah IK: Nilai Sakip</p>		<p>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan IK: Opini BPK</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah IK: Level Maturitas SPIP</p>	<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah IK: Indeks Kepuasan Masyarakat</p>		
<p>Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN Pemerintah Daerah IK: Indeks Profesionalitas ASN</p>	<p>Meningkatnya Kinerja Birokrasi dan Layanan Publik melalui Pengelolaan ASN IK: Sistem Merit</p>	<p>Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi IK: Indeks SPBE</p>	<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas IK: Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p>	<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas IK: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)</p>	<p>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel IK: 1. Opini BPK (n-1)</p>	<p>Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan IK: Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)</p>	<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah IK: Indeks Kepuasan Masyarakat (sukma-e-jatim)</p>
<p><b>CROSS CUTTING:</b> OPD Utama: 1. BKPSDM: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas ASN Pemerintah Daerah, Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Layanan Publik melalui Pengelolaan ASN (strategis)</p>	<p><b>CROSS CUTTING:</b> OPD Utama: 1. Diskominfo: Meningkatkan Pemanfaatan Aplikasi yang Terintegrasi dalam Upaya Efektivitas Kinerja Aparatur, Meningkatkan Akses Jaringan Internet di Pedesaan, Meningkatkan Jumlah Kunjungan Website, Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, dan Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk bahan perencanaan dan pembangunan (strategis) OPD Pendukung: 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan, Sistem Tertib Arsip, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip (taktikal) 2. Dispendukcapil: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (taktikal) 3. BKPSDM: Terlaksanakannya Pengelolaan Data dan Informasi Aparatur, Sistem (Aplikasi Informasi Kepegawaian) (Operasional) 4. DPMPPTSP: Meningkatkan Kemudahan Pelayanan Publik (Taktikal) 5. Dinas Kesehatan: Menurunnya Balita Stunting (Taktikal) 6. Sekretariat Daerah (Bagian PBJ): Terlaksananya Layanan dan Fasilitas Pengadaan Barang/ Jasa (Operasional)</p>		<p><b>CROSS CUTTING:</b> OPD Utama: 1. Sekretariat Daerah: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas (strategis) OPD Pendukung: Semua Perangkat Daerah</p>	<p><b>CROSS CUTTING:</b> OPD Utama: 1. Sekretariat Daerah: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas (strategis) OPD Pendukung: 1. Bappeda: Meningkatkan kesejarasan dan efektivitas perencanaan pembangunan yang sinergis (strategis) 2. Inspektoral: Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan (taktikal) 3. Seluruh PD (Operasional)</p>	<p><b>CROSS CUTTING:</b> OPD Utama: 1. Inspektoral: Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah (strategis) 2. BKAD: Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah (taktikal)</p>	<p><b>CROSS CUTTING:</b> OPD Utama: 1. Inspektoral: Meningkatkan kualitas pengawasan di lingkungan pemerintah kabupaten malang (Strategis) OPD Pendukung: 1. BKAD: Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Taktikal) 2. Bappeda: Meningkatkan kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Peaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Operasional) 3. Semua Perangkat Daerah (Operasional)</p>	<p><b>CROSS CUTTING:</b> OPD Utama: 1. Sekretariat Daerah: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas (Strategis) OPD Pendukung: 1. Sekretariat DPRD: Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Taktikal) 2. Kecamatan: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan (Taktikal) 3. Dinas Kesehatan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Taktikal) 4. RSUD: Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Strategis) 5. DPMPPTSP: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu (Strategis) 6. DISPENDUKAPIL: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan (Taktikal)</p>

POHON KINERJA

Mengembangkan Potensi Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Seimbang, Berkesinambungan dan Kondusif

IK : Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) IK : PDRB (ADHK Perkapita)		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Meningkatnya Ketangguhan dan Ketahanan terhadap Bencana IK : Indeks Resiko Bencana		Meningkatnya ketenteraman dan Ketertiban Indikator : Indeks ketenteraman dan ketertiban		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa IK : Indeks Desa Membangun		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kabupaten dalam Kondisi Baik IK : Kualitas Infrastruktur		
<b>Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi</b> IK : Nilai Investasi (Rupiah)	<b>Meningkatnya Nilai Produksi Sektor Agro</b> IK : Nilai Produksi (Rupiah)	<b>Meningkatnya Pendapatan Daerah</b> IK : Persentase Realisasi Penerimaan PAD	<b>Meningkatnya Kualitas Udara</b> IK : Indeks Kualitas Udara (IKU)	<b>Meningkatnya Kualitas Air</b> IK : Indeks Kualitas Air (IKA)	<b>Meningkatnya Kualitas Lahan</b> IK : Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<b>Meningkatnya Mitigasi, Pencegahan, dan Penanganan Pasca Bencana</b> IK : Indeks Resiko Bencana	<b>Meningkatnya Stabilitas Sosial dan Perlingungan Masyarakat</b> IK : Persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan	<b>Menurunkan Kasus Pelanggaran Perda dan Perlingungan Masyarakat</b> IK : 1. Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda 2. Persentase Penurunan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	<b>Meningkatnya Desa Berkembang menjadi Desa Maju</b> IK : 1. Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju	<b>Optimalisasi Bangunan Air Jalan</b> IK : Persentase Luas Area Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	<b>Meningkatnya Kualitas Jalan</b> IK : 1. Persentase Jalan Kabupaten yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan 2. Persentase Kuantitas Prasarana Jalur Lintas dan Sirkuitan Jalan	<b>Meningkatnya Kualitas Gedung</b> IK : 1. Persentase Rumah Layak Huni 2. Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
<b>CROSS CUTTING:</b> <b>OPD Utama :</b> 1. <b>DPMPPTSP</b> : Meningkatkan iklim Usaha (Strategis) <b>OPD Pendukung :</b> 1. <b>Diskominfotik</b> : Meningkatkan keterbukaan informasi Publik 2. <b>DPKPKK</b> : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung (Operasional) 3. <b>Dinas Tenaga Kerja</b> : Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Struktur Skala Upah serta LES Bipartit) (Operasional)	<b>CROSS CUTTING:</b> <b>OPD Utama :</b> 1. <b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b> - Meningkatkan Produk Hasil Ternak (Strategis) 2. <b>Dinas Perikanan</b> : Meningkatkan produksi perikanan budidaya (Strategis) Meningkatkan produksi perikanan tangkap (Strategis); 3. <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b> - Meningkatkan neraca perdagangan daerah (Strategis); - Meningkatkan daya saing industri (Strategis) 4. <b>Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan</b> : Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Strategis); <b>OPD Pendukung :</b> 1. <b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b> - Meningkatkan Daya Saing Pariwisata (Strategis); Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan (Strategis) 2. <b>Dinas Perhubungan</b> : Terlaksananya penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Operasional) 3. <b>DPMPPTSP</b> : Meningkatkan jumlah investor (Strategis) 4. <b>Kecamatan</b> : Meningkatkan Ketenteraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan (Operasional) 5. <b>Kominfo</b> : Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (Operasional)	<b>CROSS CUTTING:</b> <b>OPD Utama :</b> 1. <b>Badan Pendapatan Daerah</b> - Meningkatkan penerimaan daerah dan sektor PAD (Presentase Realisasi Penerimaan PAD) (Strategis); Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pajak daerah (Taktikal); Meningkatkan penerimaan daerah dan sektor bukan pajak (Taktikal) 2. <b>Dinas Tansaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan</b> - Peningkatan layanan STA, Mantung dan BLUD LDM yang berkualitas (Operasional); 3. <b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b> - Peningkatan Kapasitas UPT Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak (Operasional); Peningkatan Pelayanan RPH yang berkualitas (Operasional) 4. <b>Dinas Perikanan</b> - Tersedianya Benih Ikan pada UPT yang memenuhi Perbenihan (Operasional); Meningkatnya pemantauan pelayanan ikan (monitoring, evaluasi dan verifikasi teknis) perijinan industri kepada pelaku usaha (Operasional) 5. <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b> : Meningkatkan neraca perdagangan daerah (Strategis); Meningkatnya daya saing Industri (Operasional) 5. <b>Dinas Perikanan</b> : Meningkatkan Ketenteraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan (Operasional) 5. <b>Kominfo</b> : Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (Operasional)	<b>CROSS CUTTING:</b> <b>OPD Utama :</b> 1. <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> - Meningkatkan Upaya Pencegahan Pencemaran Air (Strategis) <b>OPD Pendukung :</b> 1. <b>Dinas Perhubungan</b> : Meningkatkan Kualitas Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Taktikal) 2. <b>DISPERINDAG</b> : Meningkatkan pemantauan (monitoring, evaluasi dan verifikasi teknis) perijinan industri kepada pelaku usaha (Operasional) 3. <b>SATPOL PP</b> : Menurunnya pelanggaran Perda dan Perda (Taktikal) 4. <b>Dinas Kesehatan</b> : Tersedianya pengelolaan kesehatan lingkungan (Operasional) - Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan pada wilayah potensi perikanan budidaya (Taktikal); - Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan pada wilayah perikanan tangkap (Taktikal); - Terlaksananya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya (Operasional)	<b>CROSS CUTTING:</b> <b>OPD Utama :</b> 1. <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> - Meningkatkan Upaya Pencegahan Kerusakan Lahan (Strategis) <b>OPD Pendukung :</b> 1. <b>DPTHP</b> : Pengelolaan Pupuk dan Pestisida (Operasional) 2. <b>DPMPPTSP</b> : Mempermudah pelayanan perizinan berusaha (Operasional) 3. <b>DTRPH</b> : Meningkatkan data spasial lahan pertanian (Operasional)	<b>CROSS CUTTING:</b> <b>OPD Utama :</b> 1. <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b> - Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Taktikal) <b>OPD Pendukung :</b> 1. <b>Dinas Pendidikan</b> : Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan (Strategis) 2. <b>DISKOMINFO</b> : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (Operasional) 3. <b>DPKPKK</b> : Meningkatkan kualitas rumah yang dilengkap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Operasional); Meningkatnya kualitas pemukiman yang layak (Strategis); Meningkatnya pelayanan ruang yang memenuhi standar berlaku (Strategis) 4. <b>DPUBM</b> : Mempertahankan fungsi pelayanan jalan dalam kondisi baik (taktikal) 5. <b>Dinas Sosial</b> : Meningkatkan Penyerapan Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal) 6. <b>DPU SDA</b> : Tersedianya Relaksasi Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Dan Pengamanan SDA yang Baik (Taktikal) 7. <b>Dinas Kesehatan</b> : Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular (Taktikal) 8. <b>SATPOL PP</b> : Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Taktikal) 9. <b>DPMD</b> : Meningkatkan Tata Kelola Desa (Taktikal)	<b>CROSS CUTTING:</b> <b>OPD Utama :</b> 1. <b>Bakkesbangpol</b> : Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Perlingungan Masyarakat <b>OPD Pendukung :</b> 1. <b>DPSA</b> : Peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Operasional) 2. <b>DISPOLA</b> : Meningkatkan Kapasitas Kepemudaan 4. <b>Dinas Sosial</b> : Meningkatkan Kesejahteraan PHES 5. <b>BPBD</b> : Meningkatkan ketangguhan dan ketahanan terhadap Bencana (Taktikal) 2. <b>Dinas Pertanian</b> : Meningkatkan kualitas pengelolaan pertanian didukung peningkatan tertib administrasi pertanian sesuai ketentuan perundang-undangan (taktikal)	<b>CROSS CUTTING :</b> <b>OPD Utama :</b> 1. <b>Sepul PP</b> : Terlaksananya Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban Umum - Terlaksananya Pelayanan Penyalamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran <b>OPD Pendukung :</b> 1. <b>BPBD</b> : Meningkatkan Ketangguhan dan ketahanan terhadap Bencana (Taktikal) 2. <b>Dinas Kesehatan</b> : Meningkatkan Keapuan Masyarakat atas pelayanan Kesehatan 3. <b>Dinas Sosial</b> : Meningkatkan Kesejahteraan PMS 4. <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> : Pengendalian Pencemaran Air, Pencemaran Udara dan Kerusakan Lahan Guna Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Taktikal) 5. <b>RSUD Kanjuruhan</b> : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai 6. <b>RSUD Lawang</b> : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai 7. <b>RSUD Ngantang</b> : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai 8. <b>DPMPPTSP</b> : Meningkatkan Keapuan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<b>CROSS CUTTING:</b> <b>OPD Utama :</b> - <b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</b> - Meningkatkan jesa Berimbang menjadi Desa Baku <b>OPD Pendukung :</b> - <b>Kecamatan</b> : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan alukhulan	<b>CROSS CUTTING:</b> <b>OPD Utama :</b> 1. <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga</b> : Meningkatkan kualitas layanan jalan Kabupaten Malang, dan Meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Malang (Strategis) 2. <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air</b> : Meningkatkan ketersediaan air irigasi dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian, dan Meningkatkan sinergi jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan luas layanan irigasi (Strategis) 3. <b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</b> : Peningkatan Sarana dan Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak, dan Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Perumahan yang memenuhi Standar Teknis (Strategis) <b>OPD Pendukung :</b> 1. <b>Dinas Perhubungan</b> : Meningkatkan Kuantitas Prasarana Jalur Lintas dan Sirkuitan Jalan (Taktikal) 2. <b>Bappeda</b> : Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kelembahan (Taktikal); Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota (Operasional)			

